

## ABSTRAK

**Andi Rio Idris, 0013.DIH.26.2020. Hakikat Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Meningkatkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Dewan Perwakilan Rakyat** (dibimbing oleh **Sufirman Rahman, Syahrudin Nawi dan Nasrullah Arsyad**).

Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui, menganalisis dan menemukan hakikat Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Meningkatkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Dewan Perwakilan Rakyat? (2) Mengetahui, menganalisis dan menemukan faktor pendukung dan penghambat Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Meningkatkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Dewan Perwakilan Rakyat? (3) Mengetahui, menganalisis dan menemukan Bagaimanakah konsep ideal Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Meningkatkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Dewan Perwakilan Rakyat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hakikat Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Meningkatkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Dewan Perwakilan Rakyat yakni Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan Lembaga etik Dewan Perwakilan rakyat dalam hal memeriksa, menyelidiki dan mengadili terjadap perilaku anggota Dewan Perwakilan rakyat yang bertentangan dengan etika sosial dan etika kelembagaan sebagai representasi dari masyarakat. Setiap warga negara siapapun yang duduk di Lembaga perwakilan merupakan cermin dari masyarakat pemilihnya. Karenanya kemudian penetapan dan penegakan standar etika hendaknya dimulai dari pendulum bawa DPR adalah sekumpulan manusia yang secara realistis harus dijaga dengan norma yang berangkat dari masyarakat dimana ia menjalankan fungsi representasinya. (2) Optimalisasi Penegakan Etika Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Penegakan Etika Dewan Perwakilan Rakyat yakni dengan meningkatkan inisiatif dalam hal ini melakukan inisiatif dalam menindak perkara yang menjadi sorotan publik. (3) Konsep ideal Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Meningkatkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Dewan Perwakilan Rakyat dalam bentuk ndependensi dalam lembaga negara, yaitu: Independensi institusional, Independensi fungsional, dan Independensi administratif.

Rekomendasi penelitian ini adalah MKD harus mengoktimalkan fungsi dan kewenanga secara independen berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD DPR RI dalam menjaga kehormatan DPR RI.

## ABSTRACT

**ANDI RIO IDRIS**, 0013.DIH.26.2020. *The Nature of the Honorary Council's Authority in Enhancing the Honor and Noble Dignity of the House of Representatives Council* (supervised by **Sufirman Rahman**, **Syahrudin Nawi** and **Nasrullah Arsyad**).

This study aims to identify, analyze and discover: (1) the nature of the honorary council's authority in enhancing the honor and dignity of the house of representatives, (2) the supporting and inhibiting factors for the honorary council's authority in enhancing the honor and dignity of the house of representatives, (3) the ideal concept of the honorary council's authority in enhancing the honor and dignity of the house of representatives.

The type of research used in this research is normative legal research, which employs an approach based on the main legal materials by examining the theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research.

The results of the study show that (1) the nature of the honorary council's authority in enhancing the honor and dignity of the house of representatives is that the honorary council is an ethical institution of the house of representatives in terms of examining, investigating and adjudicating the members' behavior which is contrary to social ethics and institutional ethics as a representation of society. Every citizen, whoever sits in a representative body, is a reflection of the electorate. Therefore, the determination and enforcement of ethical standards should start from the pendulum that the house of representatives is a group of people who realistically have to be protected by norms that originate from the society in which they carry out their representative functions. (2) Optimizing the ethics enforcement of the honorary council in upholding the ethics of the house of representatives, namely by increasing initiatives in taking action on cases that are in the public spotlight. (3) The ideal concept of the honorary council in Enhancing the honor and dignity of the house of representatives in the form of independence in state institutions, namely: institutional, functional, and administrative independence.

The recommendation of this research is that the honorary council must optimize its functions and powers independently based on the Regulation Number 2 of 2015 concerning the procedures for the honorary council in maintaining the honor of the house of representatives.

